



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG

PERSETUJUAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Laporan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung tanggal 10 November 2022 yang tertuang dalam Keputusan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Nomor : 5/Bapemperda/XI/Tahun 2022 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 128);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 72);

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Temanggung Nomor : P/594/180/01.3/XI/2022 Perihal Usulan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023;
 2. Musyawarah dan Permufakatan para Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Temanggung pada tanggal 14 November 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menyetujui Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Menyampaikan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini kepada Bupati Temanggung untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung.
pada tanggal 14 November 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
KETUA,



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Temanggung.

Lampiran : Keputusan DPRD
Kabupaten Temanggung
Nomor : 27 Tahun 2022
Tanggal : 14 November 2022

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023**

NO	JUDUL RAPERDA	PEMRAKARSA	KETERANGAN
1.	Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2022-2042	DPUPR	BARU
2.	Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran serta Penyelamatan Lainnya	SATPOL PP dan DAMKAR	BARU
3.	Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi	DPMPTSP	BARU
4.	Bangunan Gedung	KOMISI B	BARU
5.	Sewa Rumah Susun Sederhana	KOMISI C	BARU
6.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan	DKPPP	PERUBAHAN
7.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perikanan	DKPPP	PERUBAHAN
8.	Perlindungan Tembakau Temanggung	BAGIAN PEREKONOMIAN	BARU
9.	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2051	KOMISI B	BARU
10.	Badan Usaha Milik Desa	DINPERMADES	BARU
11.	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Temanggung	BPKPAD	BARU
12.	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	BPKPAD	BARU
13.	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023	BPKPAD	BARU
14.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024	BPKPAD	BARU
15.	Penyelenggaraan <i>Smart City</i>	KOMISI A	BARU
16.	Perlindungan Petani	KOMISI C	BARU
17.	Pembangunan Ketahanan Keluarga	KOMISI D	BARU

18.	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2023	BAGIAN PEREKONOMIAN	PERUBAHAN
-----	--	---------------------	-----------

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
KETUA,



[Handwritten Signature]

YUNIANTO



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jend. A. Yani No. 32 Temanggung Kode Pos 56216

Telepone. (0293) 491004 Faximile (0293) 491040

Surat Elektronik: info@temanggungkab.go.id Laman : www.temanggungkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 180/ 345 TAHUN 2023

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tertib administrasi serta dalam rangka perencanaan penyusunan produk hukum daerah khususnya peraturan bupati, perlu menetapkan Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 82 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 83 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini merupakan instrumen perencanaan program pembentukan peraturan kepala daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 31 Januari 2023



Drs. HARY AGUNG PRABOWO, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19680119 199311 1 001

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Temanggung (sebagai laporan).

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR 180/ 345 TAHUN 2023
 TANGGAL 31 JANUARI 2023

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH
 KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH	PEMRAKARSA
1	PENGELOLAAN GEDUNG SASANA BUDAYA BUMI PHALA	DINBUDPAR
2	RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024-2026	BAPPEDA
3	RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024	BAPPEDA
4	RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023-2037	BAPPEDA
5	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2022 TENTANG DISIPLIN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA	DINPERMADES
6	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2022 TENTANG CUTI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA	DINPERMADES
7	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PENATAAN PERANGKAT DESA	DINPERMADES
8	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 113 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA	DINPERMADES
9	PEDOMAN PENYUSUNAN APBDES TAHUN 2024	DINPERMADES
10	TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENGELOLAAN ADD, BHP, BHR TAHUN 2024	DINPERMADES
11	STANDAR SATUAN HARGA DAN STANDAR BIAYA UMUM DESA TAHUN 2024	DINPERMADES
12	LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA	DINPERMADES
13	BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023	SETWAN
14	PENGANGGARAN DAN PENGELOLAAN BELANJA RUMAH TANGGA PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023	SETWAN
15	BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024	SETWAN
16	PENGANGGARAN DAN PENGELOLAAN BELANJA RUMAH TANGGA PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024	SETWAN

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH	PEMRAKARSA
17	STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI DAN HARGA PRASARANA BANGUNAN GEDUNG TAHUN ANGGARAN 2023	DPUPR
18	RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN TEMANGGUNG TAHUN 2023-2043	DPUPR
19	PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL TEMANGGUNG TV KABUPATEN TEMANGGUNG SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL TEMANGGUNG TV KABUPATEN TEMANGGUNG	DINKOMINFO
20	PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO eRTe FM KABUPATEN TEMANGGUNG SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL TEMANGGUNG TV KABUPATEN TEMANGGUNG	DINKOMINFO
21	PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK	DINKOMINFO
22	PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN UKM KABUPATEN TEMANGGUNG	DINKOPDAG
23	PELAKSANAAN SEWA LOS, KIOS, DAN PERTOKOAN PASAR DAERAH DI KABUPATEN TEMANGGUNG	DINKOPDAG
24	PEDOMAN ALIH MEDIA ARSIP	DINPUSIP
25	PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP STATIS DI KABUPATEN TEMANGGUNG	DINPUSIP
26	PENGELOLAAN ARSIP TERJAGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG	DINPUSIP
27	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2019 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN TEMANGGUNG	DINKES
28	PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN TEMANGGUNG	DINKES

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH	PEMRAKARSA
29	PENGGUNAAN SISA LEBIH ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN TEMANGGUNG	DINKES
30	PENYELENGGARAAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN TEMANGGUNG	DINKES
31	STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN BIDANG PAUD, SD, SMP, DAN KESETARAAN	DINDIKPORA
32	STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINDIKPORA
33	PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU JENJANG TK, SD, DAN SMP	DINDIKPORA
34	PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK	DPRKPLH
35	PEDOMAN PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP	DPRKPLH
36	PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH DAN TEMPAT PENGELOLAAN SAMPAH	DPRKPLH
37	PEDOMAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH	DPRKPLH
38	PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA	DPRKPLH
39	LAYANAN PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MELALUI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SINGGAH DARI DINAS SOSIAL KABUPATEN TEMANGGUNG	DINSOS
40	PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2024	INSPEKTORAT
41	PEDOMAN PENANGANAN ADUAN MASYARAKAT, PEMERIKSAAN INVESTIGATIF, PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA, DAN PEMBERIAN KETERANGAN AHLI	INSPEKTORAT
42	PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN DAN PENYELAMATAN KEBAKARAN SERTA PENYELAMATAN LAINNYA	SATPOL PP DAN DAMKAR
43	PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG	DINPERINAKER
44	PELATIHAN SWADANA	DINPERINAKER
45	SATUAN TUGAS PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA KABUPATEN TEMANGGUNG	DINPERINAKER
46	PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN TEMANGGUNG	DINPERINAKER
47	PENGENDALIAN PENDUDUK, PEMBANGUNAN KELUARGA DAN KELUARGA BERENCANA	DPPPAPPKB
48	GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN	DPPPAPPKB

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH	PEMRAKARSA
49	PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKUSOR NARKOTIKA DI KABUPATEN TEMANGGUNG	KESBANGPOL
50	PENCABUTAN PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID 19)	BPBD
51	PEDOMAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA KABUPATEN TEMANGGUNG	BPBD
52	PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG	BKPSDM
53	PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI BERPRESTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG	BKPSDM
54	PERLINDUNGAN PEGAWAI DI LUAR JAMINAN YANG DISELENGGARAKAN SECARA NASIONAL BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG	BKPSDM
55	TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG	BKPSDM
56	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 91 TAHUN 2021 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PEMBERIAN KUASA MENANDATANGANI SURAT KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT LAINNYA DI BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG	BKPSDM
57	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 115 TAHUN 2017 TENTANG TENAGA PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG	BKPSDM
58	PEDOMAN PENGELOLAAN PENYEDIA JASA LAINNYA ORANG PERORANGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG	BKPSDM
59	PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 82 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN APBD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2023	BPKPAD
60	PENJABARAN PERUBAHAN APBD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2023	BPKPAD
61	PENJABARAN APBD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2024	BPKPAD
62	PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2022	BPKPAD

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH	PEMRAKARSA
63	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN DANA INSENTIF DESA DAN KELURAHAN	BPKPAD
64	PAJAK DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG	BPKPAD
65	RETRIBUSI DARAH KABUPATEN TEMANGGUNG	BPKPAD
66	PERUBAHAN STANDAR SATUAN HARGA TAHUN 2023	BPKPAD
67	STANDAR SATUAN HARGA TAHUN 2024	BPKPAD
68	PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT	RSUD
69	PERJANJIAN KERJA SAMA	RSUD
70	PEDOMAN PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, DAN TATA KERJA PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL BLUD RSUD KABUPATEN TEMANGGUNG	RSUD
71	PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA BLUD RSUD KABUPATEN TEMANGGUNG	RSUD
72	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PADA BLUD RSUD KABUPATEN TEMANGGUNG	RSUD
73	PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD	RSUD
74	PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN	BAGIAN HUKUM
75	RENCANA AKSI STANDAR PELAYANAN MINIMAL	BAGIAN PEMERINTAHAN
76	PENGELOLAAN BELANJA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN ANGGARAN 2023	BAGIAN PROKOMPIM
77	<i>CLEARING HOUSE</i>	BAGIAN PBJ
78	PEDOMAN PENETAPAN TARIF AIR MINUM, BEBAN TETAP DAN BIAYA PEMASANGAN SAMBUNGAN DI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA AGUNG KABUPATEN TEMANGGUNG	BAGIAN PEREKONOMIAN
79	PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA KABUPATEN TEMANGGUNG	BAGIAN PEREKONOMIAN
80	PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA AGUNG KABUPATEN TEMANGGUNG	BAGIAN PEREKONOMIAN
81	PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH APOTIK WARINGIN MULYO KABUPATEN TEMANGGUNG	BAGIAN PEREKONOMIAN
82	PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH BHUMI PHALA WISATA KABUPATEN TEMANGGUNG	BAGIAN PEREKONOMIAN
83	PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR KABUPATEN TEMANGGUNG	BAGIAN PEREKONOMIAN

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH	PEMRAKARSA
84	PEDOMAN PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2024	BAGIAN PEMBANGUNAN
85	PEDOMAN PEMBERIAN KESEMPATAN PENYELESAIAN PEKERJAAN BARANG/JASA MELEBIHI TAHUN ANGGARAN	BAGIAN PEMBANGUNAN
86	KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG	BAGIAN ORGANISASI
87	KELAS JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG	BAGIAN ORGANISASI
88	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PETA JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG	BAGIAN ORGANISASI
89	ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG	BAGIAN ORGANISASI
90	PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG	BAGIAN ORGANISASI
91	FASILITASI PESANTREN	BAGIAN KESRA
92	PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH	BAGIAN KESRA



a.n. BUPATI TEMANGGUNG
SEKRETARIS DAERAH,
Drs. HARY AGUNG PRABOWO, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19680119 199311 1 001